

15. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KOTA BLITAR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026 – 2030 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota

Blitar Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026 disusun dengan menerapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Ranwal RPJMD Kota Blitar yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja PD Kota Blitar Tahun 2026 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5);
 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kota Blitar
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 19);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 – 2030 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah

- Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026
- sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar serta daftar program dan kegiatan tahun 2026.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan tentang garis besar mengenai rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 berdasarkan hasil analisis bab-bab sebelumnya.

BAB V. Penutup

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja atau Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026 – 2030. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja. Sedangkan Renja menafsirkan Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Oleh karena itu dalam hal evaluasi perlu memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan antara kinerja renja dengan renstra perangkat daerah periode berjalan.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah berkesinambungan antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2023, 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025 untuk selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023, 2024 dan 2025 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam ;
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
10. Program Penempatan Tenaga Kerja;
11. Program Hubungan Industrial.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2023,
2024 dan Perkiraan Capaian Tahun 2025
Kota Blitar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	07				Urusan Tenaga Kerja										
2	07				Bidang Urusan Ketenagakerjaan										
					Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	%	72,26	71	70,44	99,21	71,5	71,5	100
					Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	%	82,16	85	73,59	86,58	87	87	100
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	%	47	48	48,65	101,35	49	49	100
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	%	82	85	76,18	89,62	87	87	100
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	650	orang	466	340	340	100	150	150	100
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	%	80	81	83,67	103,3	82	82	100
						Persentase jumlah calon tenaga kerja yang	20	%	NA	16	16,32	102,0	18	18	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program m/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						terserap melalui bursa kerja online									
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Kota Blitar	Jumlah pencari kerja terdaftar	900	orang	289	230	655	284,78	260	260	100
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yg mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll utk peningkatan kompetensi	2	orang	2	2	2	100	2	2	100
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	37,1	%	32	33,3	37,65	113,06	35,4	35,4	100
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	390	orang	120	120	244	203,33	130	130	100
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	174	orang	10	46	55	119,57	46	46	100
					Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	%	43,39	19	22,27	117,21	21	21	100
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	%	90	100	100	100	100	100	100
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	350	perusahaan	55	85	100	117,65	90	90	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	perkara	n/a	5	5	100	5	5	100
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	14	perkara	1	4	3	75,00	4	4	100
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12	Asosiasi dan serikat pekerja	n/a	4	4	100	4	4	100
					Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,25	%	2,776	2,15	2,834		2,2	2,2	100
					Meningkatnya koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	%	38,65	37,8	37,1	98,15	38,8	38,8	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	%	22	24	24	100	25	25	100
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15	Unit usaha	3	3	3	100	3	3	100
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40	Unit usaha	10	10	10	100	10	10	100
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	%	36	37,1	21,40	57,68	37,8	37,8	100
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	38,5	%	36	37,1	42,40	114,29	37,8	37,8	100
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	orang	40	200	260	130.00	200	200	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	39	%	36,1	37	38,46		38	38	100
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	37	%	33	35	36,10	103,14	36	36	100
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	%	28	30	38,46	128,20	31	31	100
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	320	Unit usaha	80	90	105	116,67	100	100	100
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	%	29	31	34,96	112,77	32	32	100
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata kelola, profilresiko,kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatan	400	Unit usaha	100	100	105	105	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	%	34	36	37,10	103,06	38	38	100
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	%	12	13	27,83	214,08	14	14	100
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10	Unit usaha	10	10	10	100	10	10	100
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi dengan kenggotaan daerah Kab/Kota	30	Unit Usaha	30	30	120	400	50	50	100
					Meningkatnya Produktifitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	%	1,8	1,9	1,47	77,37	1,95	1,95	100
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan volume usaha	2	%	1,85	1,9	2	105,26	2	2	100
						Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	%	2,3	2,4	2,83	117,92	2,5	2,5	100
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	1	%	0,5	0,5	0,6	120	0,5	0,5	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	07	2.01	0001	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	250	Unit usaha	50	50	50	100	50	50	100
2	17	07	2.01	0002	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	225	Unit Usaha	25	25	25	100	25	25	100
2	17	07	2.01	0004	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terdata	9000	Unit Usaha	9000	9000	9000	100	9000	9000	100
2	17	07	2.01	0007	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			70	150	150	100	70	70	100
						Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	2	%	21,79	1,9	3,1	163,16	1,95	1,95	100
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Wira Usaha Baru yang berhasil dikembangkan	2	%	1,16	1,8	2	111,11	1,9	1,9	100
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase Wirausaha yang dilakukan Pendampingan	100	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400	Unit usaha	100	100	100	100	100	100	100
					Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka	81,17	84	81,38	99,	84	84	100
					Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	Nilai angka	81,17	84	81,39	99	84	84	100
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	indeks	82,93	81,5	81,5	100	82	82	100
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	2	5	5	100	5	5	100
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	laporan	3	4	4	100	4	4	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	94	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	Orang/bulan	27	27	27	100	28	28	100
2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	laporan	12	12	12	100	12	12	100
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	98	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	2	2	2	100	-	-	-
2	17	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	50	50	50	100	50	50	100
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100	%	99	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						perangkat daerah sesuai standar									
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	2	3	3	100	1	1	100
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	paket	10	10	10	100	10	10	100
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	1	1	100	1	1	100
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	12	12	12	100	12	12	100
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	12	12	100	12	12	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	0	0	-	-	1	1	100
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	100	12	12	100
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	12	12	100	12	12	100
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	-	0	0	-	-	-	-
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	unit	25	25	25	100	60	60	100
2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	unit	3	3	3	100	4	4	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan, Sasaran, , Kegiatan Program dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	17	01	2.07	008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	-	0	0	-	-	-	-
2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	-	0	0	-	-	-	-
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	13	10	10	100	11	11	100
2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	unit	0	10	10	100	-	-	-
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	10	10	10	100	10	10	100
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	1	1	100	1	1	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2023, 2024 dan Perkiraan Capaian tahun 2025.

Analisis atas pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan tenaga Kerja Kota Blitar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, 2024 dan 2025.

Sampai dengan tahun 2025, capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Dan
Tenaga Kerja Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	INDIKATOR TUJUAN														
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKK	70	70,5	71	71,5	72,27	67,78	72,26	70,44	72,27	72,27	72,4	Tercapai 99,21% kategori Berhasil
2.	Persentase Nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		IKK	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	n/a	2,776	2,834	2,84	3,1	3,2	Tercapai 131,63%, kategori Sangat berhasil
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKK	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,18	81,17	81,39	84,25	84,5	84,5	Tercapai 96,89% Kategori berhasil
II	INDIKATOR SASARAN														
1.	Persentase pencari kerja yang berkompeten		IKU	80	82	85	87	89	66	82,16	73,59	87	89	90	Tercapai 108,14% Kategori berhasil
2.	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan		IKU	16	18	19	21	22	30	21,90	22	24	25	27	Tercapai 228,37% Kategori berhasil

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/ IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Persentase Koperasi Aktif		IKU	35,6	36,7	37,8	38,8	39,5	48,9	38,65	37,1	38,8	39,5	41	Tercapai 98,15% Kategori berhasil
4.	Persentase Koperasi dalam klasifikasi kesehatan koperasi		IKU	35	36	37	38	39	39	36,1	38,46	38	39	40	Tercapai 103,95% Kategori Sangat berhasil
5.	Persentase Pertumbuhan WUB		IKU	1,6	1,75	1,9	1,95	2	1,62	33,33	3,1	1,95	2,0	2,5	Tercapai 163,16% Kategori Sangat berhasil
6.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas		IKU	1,6	1,85	1,9	1,95	2	1,83	1,97	1,47	1,95	2,0	2,10	Tercapai 77,37% Kategori Cukup
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	83,56	83,56	84,00	84,25	84,5	83,34	81,17	81,39	84,25	84,5		Tercapai 96,63% Kategori berhasil

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, disajikan data capaian indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama tahun 2022, 2023, 2024. Sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2025 masih disajikan data proyeksi karena tahun 2025 masih dalam proses pelaksanaan.

Beberapa Strategi yang diupayakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam mencapai kinerja dengan maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pencari kerja
- b. Meningkatkan produktifitas usaha koperasi
- c. Meningkatkan daya saing produk UMKM melalui inovasi teknologi.

Arah Kebijakan yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja untuk mengatasi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kompetensi pencari kerja sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan kerja.
3. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui optimalisasi penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan melalui tata kelola kerja yang layak.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi melalui penilaian atas permodalan koperasi, kinerja keuangan, profil resiko.
6. Meningkatkan kualitas layanan koperasi melalui fasilitasi penerbitan badan hukum.
7. Meningkatkan produktifitas koperasi melalui fasilitasi sarpras produksi, pendampingan, standarisasi produk, kurasi produk, fasilitasi promosi, kemitraan lembaga pembiayaan.
8. Meningkatkan kualitas SDM koperasi melalui fasilitasi pelatihan dan pembinaan.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi.
10. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha, pembinaan pengelolaan keuangan dan pendataan usaha mikro.
11. Meningkatkan omset usaha mikro melalui pembinaan SDM, fasilitasi sarpras, fasilitasi promosi dan pendampingan standarisasi produk
12. Meningkatkan daya saing UMKM melalui kemitraan dan ekspor

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi serta UKM melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan. Kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan yang memadai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dinas perlu memastikan adanya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, isu terkait perlindungan tenaga kerja, baik dari sisi keselamatan dan

kesehatan kerja maupun perlindungan hak-hak tenaga kerja, juga menjadi fokus utama.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja selaku Pembina koperasi, UKM dan tenaga kerja di daerah, dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut.

- a. Kurangnya daya saing usaha mikro. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan akses permodalan, teknologi dan informasi pasar. Keterbatasan SDM terampil dan pengelolaan usaha yang kurang profesional juga turut menghambat potensi usaha mikro untuk berkembang dan bersaing dengan baik.
- b. Kurangnya kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, akibatnya tingkat pengangguran meningkat dan perusahaan semakin kesulitan dalam proses rekrutmen.
- c. Belum optimalnya pengelolaan koperasi. Hal ini sering disebabkan oleh kelemahan dalam kelembagaan organisasi, kurangnya profesionalisme dalam manajemen, dan keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan pelatihan.
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pencarian dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi dapat menghambat pencocokan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, memperpanjang waktu penempatan, dan mengurangi efektivitas dalam proses rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah menentukan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif;
- 2) Revitalisasi infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
- 4) Optimalisasi penanggulangan kemiskinan;
- 5) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2026 Kota Blitar

Nama PD: Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.765.373.109,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.765.372.320,00	
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	9,95	2.438.208.109,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	9,95	2.438.207.320,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang bersertifikat SKKNI/standart kompetensi nasional lainnya	85 %	2.438.208.109,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase pencari kerja yang bersertifikat SKKNI/standart kompetensi nasional lainnya	85 %	2.438.207.320,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	2.438.208.109,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	2.438.207.320,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	- Orang	0,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	- Orang	-	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	51,55	211.270.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	51,55	211.270.000,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	30 Orang	48.695.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	30 Orang	23.694.900,00	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	23.695.000,00	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui	2 Orang	20.791.400,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	25.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	2.903.500,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	270 orang	162.575.000,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	270 orang	187.575.100,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	230 Orang	75.075.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	230 Orang	80.987.450,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	87.500.000,00	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	106.587.650,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1028	115.895.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	1028	115.895.000,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan	85Perusahaan	115.895.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan	85Perusahaan	115.895.000,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	102.550.000,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	93.637.000,00	Penyesuaian kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	1.095.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	10.008.000,00	Penyesuaian kebutuhan
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.250.000,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.250.000,00	Penyesuaian kebutuhan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.793.823.271,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.843.824.060,00	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	4.892.593.271,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku	85	4.906.599.160,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	10.068.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	10.067.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.356.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.356.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.356.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.355.800,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen	3.356.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	12 Dokumen	3.356.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.951.416.702,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.951.417.940,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.949.178.202,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.949.179.340,00	Penyesuaian Gaji ASN Pensiun, PPPK, KGB, KP dan Mutasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.238.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.238.600,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	74.111.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	84.387.600,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.300.400,00	Penyesuaian kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	49.111.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	49.087.200,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	212.199.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	236.824.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.189.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.206.100,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.668.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.769.000,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.212.800,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.415.500,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.480.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.782.400,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.523.400,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.735.100,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.508.000,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	114.905.400,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	137.104.000,00	Penyesuaian kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.820.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.304.000,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	51.875.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	66.326.560,00	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.500.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12.500.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	39.375.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	53.826.560,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	0,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	412.544.960,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	412.544.960,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.209.960,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.209.960,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	322.335.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	322.335.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	180.377.709,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	100%	145.030.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	91.883.339,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	73.745.800,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	26.637.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.314.400,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.857.370,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.970.000,00	Penyesuaian kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	-	
5	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	0,51	192.500.000,00	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	0,51	123.387.800,00	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	25%	192.500.000,00	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	25%	123.387.800,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21 Unit Usaha	192.500.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	21 Unit Usaha	123.387.800,00	Penyesuaian kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		dalam Daerah Kabupaten/Kota			
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5,8	87.500.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	5,8	90.331.600,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya	58%	87.500.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya	58%	90.331.600,00	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	87.500.000,00	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha	90.331.600,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
7	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	21,9	105.000.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	21,9	121.501.900,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	22%	105.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	22%	121.501.900,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	105.000.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	121.501.900,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
8	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	21,2	239.785.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	21,2	267.256.100,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	22%	239.785.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	22%	267.256.100,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	239.785.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	267.256.100,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	20,5	450.100.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	20,5	522.407.600,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah nilai produksi koperasi	200 jt rupiah	450.100.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah nilai produksi koperasi	200 jt rupiah	522.407.600,00	
	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10 Unit Usaha	22.750.000,00	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10 Unit Usaha	22.750.000,00	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	427.350.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	499.657.600,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,39	1.388.845.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,39	1.388.839.900,00	
			Pertumbuhan wirausaha	4,79				Pertumbuhan wirausaha	4,79		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan		Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan	10%	1.388.845.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,		Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas	10%	1.388.839.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		dan pengelolaan keuangan			
			Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	4,80%				Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	4,80%		
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	662.500.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 Unit Usaha	662.500.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	11.375.000,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	11.375.000,00	
	Pemulihan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	109.970.000,00	Pemulihan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	25 Unit Usaha	109.969.600,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	25.000.000,00	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 Unit Usaha	25.000.000,00	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	175 Unit Usaha	40.000.000,00	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	175 Unit Usaha	40.000.000,00	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15000 Unit Usaha	165.000.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	15000 Unit Usaha	164.995.500,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	375.000.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	374.999.800,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						melalui Pendidikan dan Pelatihan					
11	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi UMKM yang Menjalin kemitraan dan ekspor	0,005	437.500.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi UMKM yang Menjalin kemitraan dan ekspor	0,005	423.500.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	0,005%	437.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	0,005%	423.500.000,00	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	437.500.000,00	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	423.500.000,00	Penyesuaian Standart Harga Satuan

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi, perangkat daerah juga berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Untuk tahun perencanaan 2026, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar mendapatkan usulan dari Program Prioritas, Musrenbang Kecamatan dan Kota serta dari pokok – pokok pikiran DPRD sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel. 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Belum optimalnya pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan potensi terhadap pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jl Mojopahit No 129 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Gedog Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	10 orang	Diakomodasi dalam Renja 2026
2	Belum optimalnya pembinaan, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan potensi terhadap pelaku ekonomi kreatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jl Madura Gg VI No 2 Rt 02 Rw 03 Kel. Sananwetan Kota Blitar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	10 orang	Diakomodasi dalam Renja 2026
3	Belum optimalnya kerjasama antar pelaku usaha mikro untuk peningkatan kelas usaha bagi usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kelurahan Kepanjenkidul, Kelurahan Sentul dan Kelurahan Bendo Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	13 orang	Diakomodasi dalam Renja 2026

No.	Usulan	Program/kegiatan/sub kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
4	Belum optimalnya pembinaan/sosialisasi/pelatihan terhadap pelaku usaha mikro	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Lingkungan Kepanjenlor, Lingkungan Sentul dan Tanggung Kota Blitar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 unit	Diakomodasi dalam Renja 2026

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah: “Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.

Sedangkan Prioritas Propinsi Jawa Timur Tahun 2026, sesuai dengan tugas fungsi Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah “Jatim Kerja Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas” yang ditindaklanjuti dengan Prioritas Kota Blitar Tahun 2026 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif”

Untuk mewujudkan Prioritas tersebut dilaksanakan Program Blitar CahPreneur yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta mendorong munculnya wirausahawan baru melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, dan bimbingan yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis yang inovatif dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan visi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga menyelenggarakan pasar kerja online. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam bertemu dan berinteraksi secara lebih efisien dan efektif di era digital. Dengan adanya pasar kerja online, diharapkan akan tercipta peluang kerja yang lebih luas dan transparan, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Blitar. Platform ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UKM lokal dengan memperluas akses mereka terhadap tenaga kerja yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis digital.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Tahun 2026-2027

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	
1	Tujuan : Meningkatnya Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Meningkatnya Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM (KOPUKM)	Tingkat Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh pencari kerja.	(Jumlah Penduduk usia kerja yang bekerja / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%	51,45	51,5	51,55	51,6	
		Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Produktifitas Tenaga Kerja adalah pengukuran PDRB per jam yang dihasilkan oleh setiap pekerja	((total output – bahan baku dan tenaga kerja)/ (input tenaga kerja + modal))	25.038.520,505	25.278.789,00	26.542.728,45	27.869.864,87	
	Sasaran 1: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja x 100%	70,44	70,50	70,55	70,60	IKU
	Sasaran : Menurunnya Permasalahan Ketenagakerjaan	Persentase penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Permasalahan ketenagakerjaan adalah berbagai masalah yang	Permasalahan Ketenagakerjaan Thn N dibanding Permasalahan	5,10	5	4,9	4,8	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	
			timbul terkait dengan tenaga kerja dalam suatu negara atau wilayah. Masalah ini meliputi berbagai aspek, seperti jumlah angkatan kerja, kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, pengangguran, dan kesejahteraan tenaga kerja	Ketenagakerjaan Thn N-1					
		Indikator Tujuan : Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMKM	NTB adalah selisih antara nilai produksi (output) dan biaya antara (biaya yang habis dipakai selama proses produksi) dari suatu produk, baik barang maupun jasa.	Jumlah NTB Koperasi dan UMKM pada Tahun N	2.834	2.90	2.95	3.00	
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas (Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset)	Koperasi Berkualitas adalah Koperasi yang masih aktif dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat volume usaha dan aset	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi aktif x 100%	24	25	26	27	IKU

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi		Target		KETERANGAN
					2024	2025	2026	2027	
	Sasaran : Meningkatnya Laba Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari aktivitas operasional dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut	Jumlah Laba Thn N - Jumlah Laba Thn N-1 / Jumlah Laba Thn N-1 x 100%	1,5	2	2,5	3	IKU
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = NRR per unsur x (0,111) NRR per unsur = Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden NRR = Nilai rata-rata	84	84,5	85	85,5	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026 disajikan sebagai berikut :

Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang bersertifikat SKKNI/standart kompetensi nasional lainnya	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Mendukung Pencapaian Tupoksi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Mendukung Pencapaian Tupoksi
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Mendukung Pencapaian Tupoksi
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Mendukung Pencapaian Tupoksi
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Mendukung Pencapaian Tupoksi
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai produksi koperasi	
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
		Pertumbuhan wirausaha	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan	
		Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM yang Menjalin kemitraan dan ekspor	Mendukung Program Prioritas Kota Blitar
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI,
UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut

Tabel 4.1

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Koperasi, UKM
dan Tenaga Kerja Tahun 2024 pada Renja Dinas
Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026

No	Langkah perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme/ SOP pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja.	Hasil dari proses pengumpulan data kinerja sesuai mekanisme SOP pengumpulan data kinerja kemudian ditindak lanjuti dengan evaluasi terhadap dokumen pengukuran kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam upaya pencapaian pengukuran data kinerja lebih optimal	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran data kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja Triwulanan menjadi dasar dalam menyesuaikan kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja PD pada periode Triwulan berikutnya.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman pelaporan kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	Memanfaatkan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.	Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar 2024, diolah

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Jumlah program yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2026 adalah 11 program, 18 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Dan
Tenaga Kerja Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				2.765.372.320,00				
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		9,95	2.438.207.320,00			10,01	2.173.349.592,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang bersertifikat SKKNI/standart kompetensi nasional lainnya		85 %	2.438.207.320,00				2.173.349.592,00
2.07.03.2.01 .0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	2.438.207.320,00	DBHCHT		100 orang	2.073.349.592,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Orang	-			10 orang	100.000.000,00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan		51,55	211.270.000,00			51,6	675.000.000,00
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui sistem magang dan Bursa Kerja Khusus (BKK)		30 Orang	23.694.900,00				35.000.000,00
2.07.04.2.01 .0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	20.791.400,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		2 orang	25.000.000,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	2.903.500,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		30 orang	10.000.000,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja		270 orang	187.575.100,00				640.000.000,00
2.07.04.2.03 .0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230 Orang	80.987.450,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		250 orang	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	106.587.650,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		100 orang	390.000.000,00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		1028	115.895.000,00			1043	245.895.000,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memberi perlindungan ketenagakerjaan		85 Perusahaan	115.895.000,00				245.895.000,00
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Perkara	93.637.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		4 perkara	219.895.000,00
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perkara	10.008.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		5 perkara	11.000.000,00
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.250.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.000.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.843.824.060,00				
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar/ketentuan yang berlaku		85	4.906.599.160,00			86	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	10.067.800,00			100%	38.067.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3.356.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		3 Dokumen	5.356.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.355.800,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	5.355.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	3.356.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Dokumen	7.356.000,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100%	3.951.417.940,00			100%	3.952.346.950,00
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Orang/bulan	3.949.179.340,00	DAU (Dana Alokasi Umum)		30 Orang/Bulan	3.950.108.350,00
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.238.600,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	2.238.600,00
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100%	84.387.600,00			100%	90.387.600,00
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	35.300.400,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		2 Paket	40.300.400,00
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	49.087.200,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		50 Orang	50.087.200,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100%	236.824.100,00			100%	249.980.000,00
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	5.206.100,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	5.210.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	23.769.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	23.800.000,00
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.415.500,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	8.425.000,00
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	28.782.400,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	28.785.000,00
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	22.735.100,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Paket	22.750.000,00
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	5.508.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Dokumen	5.510.000,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	137.104.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	150.000.000,00
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.304.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Dokumen	5.500.000,00
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100%	66.326.560,00			100%	130.000.000,00
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	12.500.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		2 Unit	25.000.000,00
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	53.826.560,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Unit	12.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	-	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Unit	93.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100%	412.544.960,00			100%	419.544.960,00
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	90.209.960,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	92.209.960,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	322.335.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		12 Laporan	327.335.000,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100%	145.030.200,00			100%	306.000.000,00
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	73.745.800,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		5 Unit	75.000.000,00
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	30.314.400,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		10 Unit	31.000.000,00
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	40.970.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		1 Unit	75.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Unit	-			1 Unit	125.000.000,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam		0,51	123.387.800,00			0,52	145.000.000,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha		25%	123.387.800,00				145.000.000,00
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit Usaha	123.387.800,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		10 unit usaha	145.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		5,80	90.331.600,00			5,80	56.000.000,00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang dibina tata kelola kelembagaannya		58%	90.331.600,00				56.000.000,00
2.17.03.2.01 .0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	90.331.600,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		100 Unit Usaha	56.000.000,00
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif		21,9	121.501.900,00			22,6	135.000.000,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		22%	121.501.900,00				135.000.000,00
2.17.04.2.01 .0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	121.501.900,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		100 Unit Usaha	135.000.000,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		21,2	267.256.100,00			21,2	295.000.000,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi		22%	267.256.100,00				295.000.000,00
2.17.05.2.01 .0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	267.256.100,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		250 orang	295.000.000,00
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi		20,5	522.407.600,00			21	565.000.000,00
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nilai produksi koperasi		200 jt rupiah	522.407.600,00				565.000.000,00
2.17.06.2.01 .0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Kota Blitar, Semua	10 Unit Usaha	22.750.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		10 Unit Usaha	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Kecamatan, Semua Kel/Desa						
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	499.657.600,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		50 unit usaha	540.000.000,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		10,39	1.388.839.900,00			10,85	1.650.000.000,00
		Pertumbuhan wirausaha		4,79				6,86	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang memenuhi kriteria legalitas dan pengelolaan keuangan		10%	1.388.839.900,00				1.650.000.000,00
		Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro		4,80%					
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	662.500.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		85 unit usaha	760.000.000,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	11.375.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		50 unit usaha	15.000.000,00
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit Usaha	109.969.600,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		25 Unit Usaha	110.000.000,00
	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit Usaha	25.000.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		10 unit usaha	50.000.000,00
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175 Unit Usaha	40.000.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		200 unit usaha	50.000.000,00
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15000 Unit Usaha	164.995.500,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		15000 Unit Usaha	165.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.17.07.2.01 .0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	374.999.800,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		300 orang	500.000.000,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM yang Menjalिन kemitraan dan ekspor		0,005	423.500.000,00			0,010	950.000.000,00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan		0,005%	423.500.000,00			0,010	950.000.000,00
2.17.08.2.01 .0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	423.500.000,00	DBH (Dana Bagi Hasil)		100 Unit Usaha	950.000.000,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, 2025

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2026.

5.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar selama satu tahun anggaran. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam penyusunannya, penting untuk melakukan analisis situasi dan kondisi terkini sektor koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan di Kota Blitar. Analisis ini mencakup pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya serta identifikasi isu-isu dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan dengan RKPD sangat diperlukan. Harmonisasi ini juga melibatkan penyesuaian dengan program-program pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan tidak adanya duplikasi kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Dengan demikian, Renja ini tidak hanya menjadi pedoman operasional tahunan tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2026 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026 mengikuti kaidah evaluasi yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pembinaan yang semakin kompleks, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam upaya mewujudkan pencapaian Tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan UKM maka koordinasi dengan perangkat daerah terkait maupun stakeholder harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sehingga efektifitas kinerja akan lebih mudah tercapai.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur koperasi dan usaha mikro serta SDM pengantar kerja dan mediator hubungan industrial dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM Dan Tenaga Kerja Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.